

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Edgar Kemal Pasha

NPP. 32.0925

Asdaf Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0925@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Dyah Poespita E, M.P.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Poverty in Kolaka Regency is a complex problem, characterized by fluctuations in the poverty rate and the high rate of extreme poverty, even though the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Kolaka Regency is the highest in Southeast Sulawesi Province, which attracts the attention of researchers to find out how poverty reduction efforts are carried out by the Social Service of Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. **Purpose:** This study aims to determine the regional poverty reduction by the Social Service of Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. **Method:** This research uses a Descriptive Qualitative approach with an inductive method. This approach was chosen because the qualitative model provides full flexibility for researchers to change the direction of research in the middle of activities in order to achieve the main objectives of the research. Data collection techniques include field observations, document studies, and interviews as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the Poverty Reduction Theory by Ubur in 2011. There were 10 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The results of the research findings related to poverty reduction in Kolak Regency are analyzed through several dimensions with the results, in the implementation sequence dimension it is known that it has been carried out systematically, in the design dimension there are already several programs in the form of innovations to solve poverty problems, in the dimensions of Time, Space, Expertise and Resources, each of these aspects has clarity, but the resource factor is still not optimal, in the effectiveness dimension several programs have been able to run effectively and produce. **Conclusion:** In general, the level of regional poverty reduction by Kabupaten Kolaka of Southeast Sulawesi Province has been carried out quite well, as evidenced by the positive trend in the analysis of each dimension.

Keywords: Poverty, Poverty Reduction, Social Service, Public Policy, Social Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan di Kabupaten Kolaka merupakan permasalahan yang kompleks, ditandai oleh fluktuasi angka kemiskinan dan tingginya angka kemiskinan ekstrem, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka menempati posisi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan daerah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif

Deskriptif dengan metode induktif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan keleluasaan penuh bagi peneliti untuk mengubah arah penelitian ditengah kegiatan demi tercapainya tujuan utama penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi Observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori Penanggulangan Kemiskinan oleh Ubur tahun 2011. Informan yang terlibat pada penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan penelitian terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolak ini dianalisis melalui beberapa dimensi dengan hasil, pada dimensi urutan pelaksanaan diketahui bahwa sudah dilakukan secara sistematis, pada dimensi desain sudah terdapat beberapa program berupa inovasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pada dimensi Waktu, Ruang, Keahlian dan Sumber Daya masing masing aspek ini sudah terdapat kejelasan hanya saja dari faktor sumber daya masih belum optimal, pada dimensi efektivitas beberapa program sudah mampu berjalan dengan efektif dan menghasilkan. **Kesimpulan:** Secara umum tingkat dengan Penanggulangan kemiskinan daerah oleh Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dilakukan cukup baik terbukti dengan tren positif pada analisis masing masing dimensi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial, Kebijakan Publik, Program Sosial

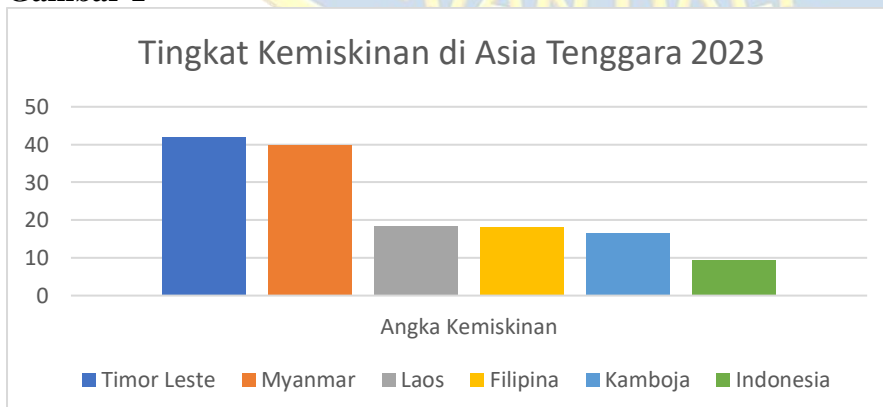
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan pada negara yang tergolong dalam negara berkembang merupakan permasalahan kompleks dan cukup rumit untuk diselesaikan (Handayani et al., 2023). Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kekurangan pendapatan namun berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses layanan publik dan infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kemiskinan merupakan masalah komprehensif yang banyak memberikan dampak bagi masyarakat seperti kurangnya biaya terhadap akses kesehatan, maupun pendidikan (Tambunan, 2012). Masyarakat akan dahulu mengutamakan kebutuhan primer yaitu makan dan minum sehingga kepentingan untuk melaksanakan pendidikan belum dapat dipenuhi.

Salah satu negara yang mengalami permasalahan kemiskinan yaitu Indonesia, diketahui permasalahan sampah menjadi permasalahan sosial yang paling mayoritas (Madjid & Setiawan, 2021). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menduduki urutan ke 6 negara dengan angka kemiskinan tertinggi, peringkat pertama di tempati oleh Timor Leste, Myanmar, Laos, Filipina, Kamboja, dan Indonesia dan terjadi dalam bagan berikut :

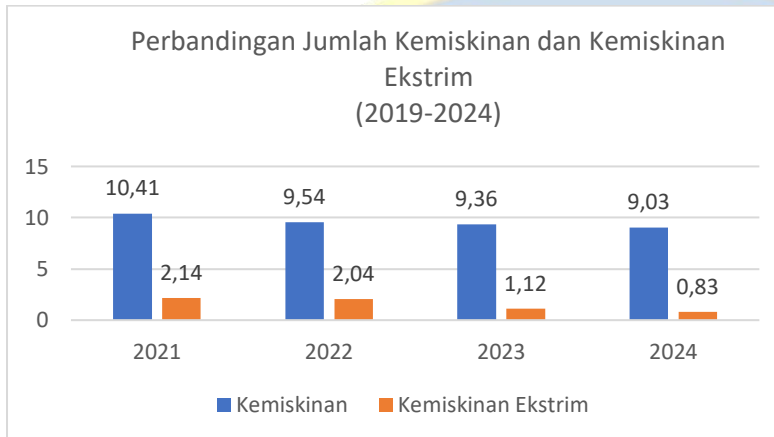
Gambar 1



Sumber : [GoodStats](#) (2024)

Selain mengalami permasalahan kemiskinan, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan kondisi kemiskinan ekstrem (Zulaika et al., 2024). Kemiskinan ekstrem dapat diukur dengan menggunakan ukuran kemiskinan absolut salah satunya yaitu dengan mengikuti definisi bank dunia, yakni daya beli suatu penduduk dibawah US\$1,9, per hari (Pogge, 2017). Definisi ini menunjukkan bahwa individu yang hidup dengan pengeluaran di bawah ambang batas tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Berikut merupakan jumlah perbandingan angka kemiskinan ekstrim dan jumlah kemiskinan di Indonesia :

Gambar 2

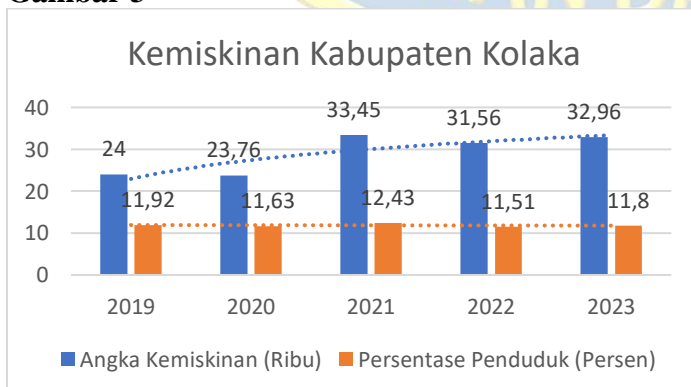


Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2024)

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh memulihnya ekonomi setelah kondisi Covid-19 yang mulai membaik (Pereira & Oliveira, 2020). Pulau Sulawesi adalah salah satu Pulau di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan dan turut menyumbang jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia. Salah satu yang tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka kemiskinan mencapai 11,21. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untu segera melakukan tindakan.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga mengalami masalah kemiskinan yaitu Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka sendiri mengalami fluktuasi angka kemiskinan. Berdasarkan Buku Kabupaten Kolaka Dalam Angka tahun 2024 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kolaka mengalami fluktuasi dan konsisten bertambah ditahun 2023. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kolaka :

Gambar 3



Sumber : BPS Kabupaten Kolaka (2024)

Data tersebut juga apabila dilihat lingkup nasional maka persentase angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka berada diatas rata-rata Nasional yaitu 9,03% dan Provinsi Sulawesi Tenggara 11,21%. Selain itu, Kabupaten Kolaka tidak hanya mengalami kemiskinan namun juga mengalami masalah kemiskinan ekstrim. Secara regional pada tahun 2023, Kolaka berada berada pada posisi ke 10 dari 17 Kabupaten/Kota penyandang kemiskinan ekstrim dengan persentase 1,80 persen penduduk miskin ekstrim atau sebanyak 34.437 individu. Hal ini berimbas pada tingginya keluarga miskin yang berdampak pada kondisi keluarga/*family caring* (Kaplan, 2018).

Dampak yang terjadi dari permasalahan kemiskinan harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu Dinas yang menjadi *Leading Sector* penanggulangan kemiskinan yaitu Dinas Sosial (Bestary et al., 2023). Dinas Sosial Kabupaten Kolaka memiliki tugas merumuskan kebijakan dan program, penyusunan norma standar, serta prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin. Berdasarkan hal ini yang melatar belakangi penelitian ini dilaksanakan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan, masih terdapat kesenjangan dalam hal efektivitas program-program tersebut. Perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana program-program yang ada telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Penelitian dapat berfokus pada evaluasi dampak program, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, serta menganalisis kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat setempat (Plante, 2019).

Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan lintas sektoral (Heger et al., 2020). Namun, seringkali terjadi tumpang tindih program atau kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta dan masyarakat sipil. Penelitian dapat mengkaji bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atau Dinas Tenaga Kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Analisis dapat mencakup identifikasi hambatan dalam koordinasi dan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antar lembaga.

Banyak program penanggulangan kemiskinan bersifat jangka pendek dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan serta pemberdayaan Masyarakat (Riswati & Susilawati, 2018). Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap program-program yang ada, identifikasi praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat, serta rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, penelitian pertama karya Adi Wisnutama; Joko Pramono; dan Aris Tri Haryamto tahun 2023 berjudul Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan indikator utama angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun semakin efektif, hal ini menunjukkan secara persentase penduduk miskin ekstrem kecil tapi secara jumlah pasti besar (Wisnutama et al., 2023).

Penelitian karya Mohammad Mulyadi pada tahun 2018 berjudul Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat strategi khusus dalam penanganan kemiskinan yaitu integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu (Mulyadi, 2018).

Penelitian karya Agnes Pradina Simanjuntak pada tahun 2019 berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peserta PKH dikisaran usia 31-40 tahun. Tingkat pendidikan sekitar 76,70 persen setara SD/MI (Pradina, 2019).

Penelitian karya Murdiyana dan Mulyana tahun 2017 berjudul Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kemiskinan dari orde baru hingga era Presiden Joko Widodo. Proses ini dengan melalui kebijakan yang sudah sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Penelitian dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi karya Muslim Sabarisman pada tahun 2015 dengan hasil penelitian membuktikan, bahwa peran dinas sosial Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan belum mencapai tujuan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum mendukung, koordinasi masih lemah, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program masih terbatas (Sabarisman, 2015).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi penanggulangan kemiskinan daerah dengan fokus khusus pada Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan data terkini yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, memberikan gambaran aktual tentang kondisi dan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi karakteristik unik Kabupaten Kolaka yang belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan, termasuk faktor geografis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi dinamika kemiskinan di daerah ini. Dengan menggabungkan data terbaru dan analisis mendalam terhadap karakteristik lokal, penelitian ini menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang tantangan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang penanggulangan kemiskinan di daerah yang kurang terwakili dalam literatur, serta memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan dalam merancang program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal Kabupaten Kolaka.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan daerah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif untuk melihat pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini, selain itu pendekatan ini juga

memungkinkan penulis untuk menyampaikan informasi hasil penelitian secara rinci dan mendalam (Creswell & Angeles, 2011). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Penanggulangan Kemiskinan oleh Ubur tahun 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumen dan juga wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada stakeholder yang terlibat dalam pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Kolaka dan juga kepada kelompok penerima manfaat dalam hal ini adalah masyarakat, Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, informan kunci adalah informan utama yang dianggap memiliki pengetahuan luas terhadap sebuah topik yang sedang dibahas dan itu memang menjadi sebuah keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun waktu penelitian diperkirakan selama 20 hari pada bulan Januari 2025. Lokus penelitian ini secara umum berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan lebih terfokus pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka serta beberapa titik rumah Masyarakat di Kabupaten Kolaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian akan membahas secara komprehensif mengenai penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dengan menggunakan pendekatan penanggulangan kemiskinan oleh (Ubur, 2011) dengan dimensi yang dianalisis antara lain, dimensi Urutan Pelaksanaan, Desain; Waktu, Ruang, Keahlian dan Sumber Daya, Efektivitas. Berikut merupakan penjelasan mengenai dimensi yang digambarkan oleh indikator penyusunan penanggulangan kemiskinan :

3.1 Urutan Pelaksanaan

Urutan pelaksanaan merupakan proses alur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial maka terdapat urutan pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas sehingga dapat menghasilkan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Dimensi ini dianalisis lebih dalam melalui beberapa indikatornya, indikator pertama adalah sistematis dengan hasil penelitian, Proses sistematis diperlukan oleh dinas sosial sebagai upaya terukur untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Proses sistematis dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Proses penanggulangan kemiskinan pada aplikasi SIKS-NG dilakukan dengan memperhatikan data kemiskinan yang ada pada Kabupaten Kolaka kemudian data tersebut diverifikasi melalui musyawarah desa untuk memustuskan masyarakat yang berhak menerima bantuan yang berasal dari Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka juga menjelaskan bahwa proses pelaksanaan dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat dengan proses musyawarah dengan melibatkan pihak aparatur desa/kelurahan, tokoh masyarakat, Dinas Sosial hingga dilakukan penandatanganan data oleh Sekda atau Bupati dan diberikan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat desa, aparatur desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat untuk memverifikasi data kemiskinan yang selanjutnya akan diinput ke aplikasi SIKS-NG untuk ditindak lanjuti dan kemudian mendapatkan bantuan sosial. Proses sistematis penting untuk dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari masyarakat bawah sehingga data yang diperoleh merupakan data terbaru dan sangat dirasakan oleh masyarakat bawah.

Pada indikator kedua berkaitan dengan proses manajemen dengan hasil penelitian Proses manajemen merupakan tahapan dalam penanggulangan kemiskinan yang didahului dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam proses manajemen yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka sudah dilakukan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh staf Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan didahului dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang (Musrebang) yang dilaksanakan pada tingkat wilayah terendah yaitu desa atau kelurahan. Kemudian untuk proses pengorganisasian dilaksanakan dengan mengoptimalkan bidang-bidang yang terdapat di Dinsos dengan melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat untuk input data masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat miskin. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilakukan dengan mengkolaborasi program Nasional dan Regional. Untuk masyarakat yang telah terdapat dalam DTKS maka akan mendapatkan bantuan dari kementerian namun apabila terdapat masyarakat miskin dan belum terdata maka masyarakat akan mengusulkan dengan bantuan aparat desa/kelurahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinergitas dan kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hasil akhir yang maksimal

Pada indikator ketiga berkaitan dengan *need assesment* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penilaian kebutuhan atau *Need Assessment* merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kondisi yang terjadi dengan merumuskan penyebab kemiskinan, menentukan kebutuhan utama masyarakat miskin dan menentukan intervensi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka melakukan penilaian kebutuhan dengan melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat untuk melakukan input data terhadap masyarakat yang akan mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka juga menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penerima bantuan yang terdaftar di Kementerian Sosial yang dianggarkan melalui APBN dan pengusulan mandiri yang dianggarkan melalui APBD. Dalam proses pemberian bantuan dilakukan dengan verifikasi sehingga mendapatkan data masyarakat yang benar layak untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 400/06.a/2025 tentang penunjukan fasilitator SLRT Kabupaten Kolaka tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Penilaian kebutuhan atau *Need Assessment* merupakan proses penting untuk mendapatkan data yang valid sehingga program sosial yang dijalankan baik melalui Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dapat tepat sasaran. Selain itu, Penilaian kebutuhan atau *Need Assessment* merupakan proses yang penting untuk menentukan intervensi atau program yang tepat yang dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan melibatkan 133 pekerja sosial ke masyarakat sebagai fasilitator SLRT di Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan uraian pada indikator urutan pelaksanaan yang terdiri dari sistematis, proses manajemen, dan *Need Assesment* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka menunjukkan adanya penerapan yang sistematis dan terstruktur. Hal ini tercermin dari keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat desa, aparat desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat dalam proses verifikasi data kemiskinan yang kemudian diinput ke dalam sistem aplikasi SIKS-NG. Selanjutnya, proses manajemen dilakukan secara kolaboratif dengan mengintegrasikan program dari tingkat nasional dan daerah. Masyarakat yang terdata dalam DTKS menerima bantuan dari Kementerian Sosial, sementara masyarakat yang belum terdata dapat diusulkan melalui aparat desa

3.2 Desain

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diperlukan program-program yang diperlukan sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam program penanggulangan kemiskinan diperlukan metode yang tepat sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang masih mempunyai potensi untuk bekerja maka bantuan yang

diberikan berupa barang atau alat yang dapat digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya jika penerima bantuan adalah lansia atau disabilitas maka bantuan yang diberikan berupa uang untuk membeli bahan pokok yang diperlukan untuk kegiatan konsumtif. Selain itu desain program juga yang dibuat oleh dinas sosial dilakukan dengan bekerja sama Dinas Ketenagakerjaan. Dinas ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa latihan kerja untuk meningkatkan *softskill* yang dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan. Sedangkan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu memberikan pelatihan terutama berkaitan dengan *capacity bulding* kepada calon penerima sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik.

Program lain yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka yaitu peningkatan jumlah penerima bantuan dari 500 orang menjadi 1000 orang. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terdapat program bantuan sosial yang diberikan kepada disabilitas tidak berdaya, cacat permanen dan juga lansia yang terlantar, adapun bantuan yang diberikan bentuknya berupa uang tunai. Pemberian uang tunai berfokus pada pelayanan dasar untuk masalah konsumsi agar lansia yang tidak berdaya sama orang disabilitas tidak menjadi beban keluarga. Selain itu, jika merujuk pada hasil wawancara bersama Ibu Wulan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan hampir 10 tahun dengan masyarakat penerima bantuan akan mendapatkan bantuan pada bulan ke empat dengan total Rp.840.000 dengan proses yaitu Data masyarakat yang diusulkan masuk pada bulan November atau Desember kemudian diverifikasi, jika masyarakat yang sudah masuk pada DTKS maka tidak akan mendapat bantuan dari Dinas Sosial.

Hasil analisis dokumen terkait penurunan kemiskinan di Kabupaten Kolaka yang termuat dalam matriks pemetaan program/kegiatan dan anggaran penurunan kemiskinan Kabupaten Kolaka yang melibatkan beberapa dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas-Dinas lain yang berperan dalam pemberian program tertentu dalam penanggulangan kemiskinan

Gambar 4

No.	Strategi PPKE	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode Nomenklatur	Program	Sub Kegiatan	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	8	9	10
50	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	135 Desa/Kel.	135 orang
51	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DAU	135 Desa/Kel.	135 PSKS
52	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.03	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	DAU	12 Kecamatan	83 orang
53	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.05	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DAU	12 Kecamatan	50 orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kolaka (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan analisis dokumen matriks pemetaan program/kegiatan dan anggaran penurunan kemiskinan Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki program penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam Matriks Khusus Dinas Sosial Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kolaka serta melaksanakan program Nasional yaitu PKH. Lebih lanjut, dengan

memberikan pelatihan terutama berkaitan dengan *capacity bulding* kepada calon penerima diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola bantuan yang diberikan. Selain itu, pemberian bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada lansia dan disabilitas didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak bisa meningkatkan kemampuan diri karena keterbatasan fisik sehingga bantuan diberikan berupa uang tunai yang digunakan untuk kegiatan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada dimensi desain dengan indikator yaitu program-program yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa desain program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka menunjukkan pendekatan yang adaptif dan berbasis pada kondisi spesifik penerima manfaat. Program dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas individu penerima bantuan. Dalam pelaksanaan program juga melibatkan kerja sama lintas instansi, seperti antara Dinas Sosial dan Dinas-Dinas lain bertujuan untuk memaksimalkan keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka.

3.3 Ruang, Waktu, Keahlian dan Sumber Daya

Pada dimensi ini lebih lanjut dijelaskan melalui indikator indikatornya. Indikator pertama terkait dengan ruang dengan hasil Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, ruang berkaitan tempat pelaksanaan. Kabupaten Kolaka memiliki 12 Kecamatan yang keseluruhan kecamatan tersebut mendapatkan bantuan sosial yang dilaksanakan melalui program Lansia dan masyarakat Disabilitas. Sedangkan untuk program berupa bantuan lainnya dilaksanakan sesuai dengan Proposal pengajuan yang telah lulus verifikasi sehingga akan diberikan bantuan yang diajukan. Menurut pernyataan Kepala Dinas Kabupaten Kolaka menyebutkan bahwa “kami selalu berupaya untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kolaka dan memastikan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat”.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa program bantuan sosial dilaksanakan secara merata di seluruh 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka, dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan masyarakat setempat. Program untuk lansia dan disabilitas dilaksanakan di seluruh kecamatan, sedangkan bantuan lainnya diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat dan telah melalui proses verifikasi lapangan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan bantuan, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Pada indikator waktu menunjukkan hasil penelitian Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan berdasarkan jadwal rencana kegiatan yang telah disusun dimasing-masing bidang. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dilaksanakan setiap 3 bulan dengan metode *home visit*. Metode *home visit* digunakan dengan sistem mengunjungi rumah dan melakukan pembagian bantuan sosial, metode *home visit* biasa digunakan pada masyarakat disabilitas dan lansia. Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten Kolaka sebagai berikut “Pelaksanaan program tergantung dari rencana kegiatan setiap bidang memiliki jadwal berbeda, untuk program pada lansia disabilitas dilaksanakan tri wulan, setiap 3 bulan turun ke lapangan, dengan metode *home visit*”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan program berupa pemberian bantuan alat/barang yang diajukan melalui proposal dilaksanakan pada triwulan 2 atau 3 yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, atau September. Pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dilaksanakan dengan menunggu proposal yang diajukan atau sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan sebelum tahun anggaran. Untuk pengusulan masyarakat yang layak menerima bantuan dilaksanakan pada Bulan Oktober atau November dan pada Bulan Desember akan dilaksanakan verifikasi


kemudian Surat Keputusan (SK) penerima bantuan akan dikeluarkan pada Bulan Januari. Pengusulan masyarakat yang layak menerima bantuan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November dan kemudian akan diverifikasi pada Bulan Desember dan SK akan diterbitkan pada Bulan Januari. Untuk bantuan yang diterima diberikan pada Bulan April dengan total Rp.840.000.

Indikator selanjutnya berkaitan dengan keahlian dengan temuan k merupakan kondisi kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik. Dalam hal ini, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan oleh 133 tenaga sosial masyarakat yang telah mendapat *capacity building* terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG terkhusus untuk proses input data penerima bantuan. Hasil analisis dokumen terkait penunjukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), menunjukkan bahwa terdapat 12 personil yang bertugas pada 12 kecamatan dengan honor Rp.1.000.000/bulan. Berikut merupakan lampiran surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Nomor 460/07.a/2025 tentang penunjukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Kabupaten Kolaka tahun 2025.

Gambar 5

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 460 / 07 . a / 2025
 TANGGAL : 02 JANUARI 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

No.	NAMA TKSK	KECAMATAN TUGAS	JUMLAH HONOR / BULAN (Rp)	KET.
1	ABD.MALIK	TKSK Kolaka	1.000.000,-	Selama 12 Bulan
2	LELY	TKSK Wundulako		
3	SULHAM JAYA.ST	TKSK Baula		
4	NURHAYATI	TKSK Pomalaa		
5	NOOR TAQWA, SE	TKSK Tanggetada		
6	SOFYAN, S.Pd	TKSK Polinggona		
7	MUH. AKIB	TKSK Watubangga		
8	JAENO	TKSK Toari		
9	MUH. ASRUL	TKSK Latambaga		
10	ABD. ASIS, S.Pd	TKSK Samaturu		
11	SAFARUDDIN	TKSK Wolo		
12	NUR HALIS AMIR, S.HI	TKSK Iwoimendaa		

KEPALA DINAS SELAKU
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

 ALFIAN, SE., M.Pd
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 19691118 199802 1 004

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, 2025

Indikator selanjutnya terkait dengan Sumber daya dengan temuan bahwa Dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka memiliki Sumber Daya berupa anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal anggaran, untuk program pemberian bantuan berupa uang tunai khususnya pada lansia dan disabilitas yang merupakan program utama Dinas Sosial yang ditargetkan pada 500 orang di 12 kecamatan dilaksanakan dengan bantuan APBD yaitu Rp. 4.079.228.776. Lebih lanjut, anggaran Dinas Sosial pada tahun sebelumnya yaitu Rp. 1,6 Milyar yang terserap habis untuk diberikan bantuan kepada 500 orang lansia dan disabilitas dengan jumlah Rp.280.000 per bulan yang diberikan setiap Tri Wulan yaitu Rp.840.000 dan pada tahun 2025 ini ditargetkan mencapai 1000 orang lansia dan disabilitas penerima bantuan. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dalam pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan Dinas Sosial dibantu oleh 133 pekerja sosial masyarakat. Selain itu, dalam proses penyaluran bantuan dibantu oleh 12 personil Dinas Sosial yang menggunakan metode *door to door home visit*

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka khususnya dalam program yang dijalankan oleh Dinas Sosial melibatkan 133 pendamping yang secara kuantitatif cukup namun secara kualitas masing kurang sebab keterbatasan alat yang dimiliki. Untuk pelaksanaan

penyaluran, Dinas Sosial melibatkan 12 personil yang ditargetkan akan menyalurkan pada 1000 orang.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada dimensi Waktu, Ruang, Keahlian dan Sumber Daya dengan indikator yaitu waktu, tempat, keahlian, dan sumber daya dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka telah dirancang secara terstruktur dengan mempertimbangkan aspek waktu, ruang, keahlian, dan sumber daya. Program ini berjalan berdasarkan siklus tahunan dengan penyaluran bantuan secara triwulanan, mencakup seluruh kecamatan, dan difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas.

3.4 Efektivitas

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka, efektivitas berkaitan dengan menghasilkan suatu hasil yang berarti bahwa program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan kriteria *measurable* atau terukur, *observable* atau teramati, dan *quantifiable* atau dapat dihitung.

Pada indikator *measurable* atau terukur hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka diketahui bahwa Dinas Sosial melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat dan 12 personil Dinas Sosial untuk menetapkan penerima bantuan yang ditetapkan berdasarkan ukuran yang diatur oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program dinilai melalui indikator kuantitatif dan pengamatan lapangan. Dinas Sosial menetapkan penerima bantuan berdasarkan ukuran dan ketentuan yang telah diatur pemerintah, dengan melibatkan 133 pekerja sosial masyarakat dan 12 personil lapangan. Keberhasilan program diukur dari penurunan angka kemiskinan berdasarkan data resmi dari BPS serta perkembangan usaha penerima bantuan, khususnya dalam program bantuan alat usaha.

Pada indikator *observable* atau teramati hasil temuan menyatakan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka melakukan tinjauan lapangan yang biasa dilakukan pada masyarakat yang menerima bantuan berupa alat usaha. Tinjauan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung perkembangan dan dampak penggunaan bantuan yang telah diberikan, seperti pada usaha perbengkelan, jahit, atau bentuk usaha produktif lainnya. Melalui pengamatan lapangan ini, Dinas Sosial dapat menilai apakah bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh penerima dan mampu mendorong peningkatan taraf hidup serta kemandirian ekonomi masyarakat

Pada indikator *Quantifiable* atau dapat diukur hasil temuan menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kolaka menetapkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan data yang objektif dan terukur. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang secara berkala menyajikan data jumlah penduduk miskin. Dengan menjadikan data BPS sebagai acuan, Dinas Sosial dapat memantau penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, serta memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis dokumen penulis menemukan bahwa Dinas Sosial melakukan pencatatan terhadap daftar penerima bantuan, seperti jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBN, KIS APBD, KIS Provinsi yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran bantuan.

Tabel 1

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BULAN JANUARI-MARET 2025							
KECAMATAN	No	DESA/ KELURAHAN	pkh	bpnt	kis apbn	kis apbd	kis prov.
WUNDULAKO	1	19 nopember	196	175	1.509	431	85
	6	bende	73	99	706	215	38
	2	kowioha	54	62	754	169	40
	5	lamekongga	94	106	779	310	36
	8	ngapa	57	87	784	277	25
	3	sabiano	79	121	858	80	33
	9	silea	160	176	1.178	150	17
	10	tikonu	64	78	530	153	23
	7	towua	71	112	670	242	17
	11	unamendaa	75	91	713	294	23
	4	wundulako	76	79	715	421	41
		JUMLAH		999	1.186	9.196	2.742
	TOTAL		10.800	12.937	91.947	26.735	16.768

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, 2025

Dari hasil observasi, wawancara bersama para informan, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria *measurable* atau terukur, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka belum melakukan proses terukur dengan melibatkan 133 pekerja sosial dan 6 personil yang bertugas di 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka. Sedangkan untuk kriteria *observable* atau teramati Dinas Sosial rutin melakukan peninjauan terhadap penerima bantuan khususnya pada penerima bantuan berupa alat usaha dengan harapan usaha yang dimiliki dapat berkembang. Sedangkan Kalau untuk kriteria *quantifiable* atau dapat dihitung, Dinas Sosial berpedoman pada data BPS yang rutin mengeluarkan hasil survei masyarakat yang masih masuk kedalam kategori miskin baik itu miskin biasa maupun miskin ekstrim

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama pada penelitian ini meliputi beberapa hal yang dianggap krusial. Adapun dari sisi dimensi urutan pelaksanaan mengungkapkan bahwa Hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Kolaka menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam pengolahan data kemiskinan di tingkat desa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kolaka pada tahun 2022, penggunaan SIKS-NG telah meningkatkan akurasi data kemiskinan hingga 85%, dibandingkan dengan 70% pada sistem pendataan sebelumnya. Aplikasi ini memungkinkan pemutakhiran data secara real-time, sehingga membantu penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tertata dan tepat sasaran. Analisis data menunjukkan bahwa sekitar 8% penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan pemutakhiran data dan kendala teknis dalam pengoperasian sistem. Dinas Sosial Kolaka telah merespon tantangan ini dengan mengadakan pelatihan intensif bagi 133 operator SIKS-NG di tingkat desa dan kecamatan, serta melakukan verifikasi silang dengan data kependudukan secara berkala. Hasil ini sama halnya dengan penelitian terdahulu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan desa yang dilaksanakan secara sistematis (Ramadhani & Agustina, 2025)

Pada temuan kedua terkait dengan dimensi desain temuan utama yang didapatkan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah menerapkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang adaptif, berbasis kondisi spesifik penerima manfaat, dan melibatkan kerja sama lintas instansi, yang terbukti meningkatkan efektivitas program. Laporan evaluasi tahun 2022 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 11,7% (2020) menjadi 10,2% (2022).

Program unggulan "Kolaka Berdaya" mengintegrasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi lokal, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian. Di Desa Lamokato, program ini membantu 150 keluarga miskin melalui pelatihan pertanian organik, meningkatkan pendapatan rata-rata 25%. Di Desa Watubangga, 100 keluarga miskin dibantu dengan pelatihan kerajinan, meningkatkan pendapatan 30%. Sistem monitoring berbasis teknologi memungkinkan penyesuaian program secara real-time. Hasil ini sama halnya dengan penelitian terdahulu dalam pengentasan kemiskinan melalui desain yang jelas berupa pemanfaatan PNPM Perkotaan (Dwiyanto, 2013).

Pada temuan utama di dimensi efektivitas dengan temuan utama bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kolaka menerapkan sistem evaluasi komprehensif untuk mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan, menggunakan basis data BPS dan metode ceklis dengan kriteria evaluasi terstruktur. Evaluasi tahun 2022 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 11,7% (2020) menjadi 10,2%, namun efektivitas bervariasi antar program. Program "Kolaka Berdaya" dinilai paling efektif, dengan peningkatan pendapatan 25-30% di desa percontohan Lamokato dan Watubangga. Sistem monitoring berbasis teknologi meningkatkan tingkat keberhasilan program secara keseluruhan dari 70% menjadi 85%. Evaluasi mengidentifikasi tantangan utama pada koordinasi lintas instansi (skor 6,5/10) dan pemerataan akses di daerah terpencil (7/10). Meski ada kemajuan, evaluasi menunjukkan bahwa 15% program masih belum mencapai target efektivitas, mendorong Dinas Sosial untuk terus menyempurnakan strategi melalui peningkatan SDM dan sistem informasi terpadu guna meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Kolaka. Hasil ini sama halnya dengan penelitian yang mengungkap tentang pengentasan kemiskinan yang berjalan efektif dalam pelaksanaannya (Kamil & Artiningsih, 2024).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkapkan hal menarik lainnya berkenaan dengan hambatan yang terjadi. Adapun hambatan yang terjadi meliputi Faktor internal seperti keterbatasan anggaran operasional, kualitas 133 tenaga sosial masyarakat yang rerata belum memiliki alat elektronik yang memadai dan ketiga tumpang tindihnya kebijakan mengenai penerima bantuan. Adapun faktor penghambat seperti tidak padannya data yang dimiliki oleh masyarakat, KTP yang digunakan masih menggunakan KTP lama atau belum memiliki KTP elektronik dan masyarakat penerima bantuan yang terkadang tidak berada ditempat.

IV. KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan daerah oleh Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dilakukan cukup baik hal tersebut didasarkan pada proses pelaksanaan yang sistematis, desain atau program yang melibatkan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, ruang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengakomodir seluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka, dan personil dinas sosial yang aktif dalam melakukan tinjauan terhadap masyarakat penerima bantuan

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan yang dirasakan penulis selama proses penelitian adalah keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat, keterbatasan akses data informasi yang disebabkan karena adanya bencana alam banjir sehingga dokumen yang bersifat fisik hilang dan tidak ditemukan, keterbatasan akses mobilitas juga dirasakan karena banyak kelompok Masyarakat miskin yang belum tercover namun berada di daerah pinggiran.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari ketidaksempurnaan itu. Oleh karena itu diharapkan penelitian di masa depan bisa lebih fokus pada analisis kolaborasi

pemerintah dan stakeholder lainnya dalam konsep penta helix.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi: kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang dibagikan, serta secara khusus kepada Ibu Dyah Poespita yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat yang berperan dalam pembentukan karakter penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumbangsih dalam kemajuan ilmu pengetahuan, serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2023). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>
- Creswell, J. W., & Angeles, L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*. SAGE Publication, 1–443.
- Dwiyanto, B. (2013). Rekonstruksi Kelembagaan Kebun Kopi Rakyat (Model Rekayasa Sosial Penguatan Usaha Tani Kopi Rakyat). *Jurnal Maksipreneur*, III(1), 36–61. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Heger, M. P., Zens, G., & Bangalore, M. (2020). Land and poverty: The role of soil fertility and vegetation quality in poverty reduction. *Environment and Development Economics*, 25(4), 315–333. <https://doi.org/10.1017/S1355770X20000066>
- Kamil, M., & Artiningsih, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 9(1), 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/tpwk.2024.34849>
- Kaplan, R. L. (2018). Family caregiving and the intergenerational transmission of poverty. *Journal of Law, Medicine and Ethics*, 46(3), 629–635. <https://doi.org/10.1177/1073110518804216>
- Madjid, U., & Setiawan, I. (2021). Governance In Overcoming Social Problems At The Country Border In Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VI(01), 1–23.
- Mulyadi, M. (2018). Strategi pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan kesenjangan. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X(9), 13–18. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-9-I-P3DI-Mei-2018-192.pdf
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Pereira, M., & Oliveira, A. M. (2020). Poverty and food insecurity may increase as the threat of COVID-19 spreads. *Public Health Nutrition*, 23(17), 3236–3240.

- <https://doi.org/10.1017/S1368980020003493>
- Plante, C. (2019). Policy or window dressing? Exploring the impact of poverty reduction strategies on poverty among the Canadian provinces. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 35(1), 112–136. <https://doi.org/10.1080/21699763.2018.1549090>
- Pogge, T. (2017). Fighting global poverty. *International Journal of Law in Context*, 13(4), 512–526. <https://doi.org/10.1017/S1744552317000428>
- Pradina, A. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. *Tesis*, 1–188. [https://lib.unnes.ac.id/40993/1/UPLOAD AGES PRADINA.pdf](https://lib.unnes.ac.id/40993/1/UPLOAD%20AGES%20PRADINA.pdf)
- Ramadhani, S. A. P., & Agustina, I. F. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa. *DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 14(04), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v14i4.4913>
- Riswati, R., & Susilawati, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Jatigede Oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 121–135. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.401>
- Sabarisman, M. (2015). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SUKABUMI. *SOSIO KONSEPSIA*, 4(03), 1–23. <https://media.neliti.com/media/publications/52908-ID-peran-dinas-sosial-dalam-penanggulangan.pdf>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Tambunan, T. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 73–92. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.73-92>
- Ubur, Hubertus. (2011). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur). *Aspirasi: Masalah-Masalah Sosial* – Vol 2, No 2 (2011) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/443/0>
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002>
- Zulaika, S., Zul Fauzi, F., & Suryapusita, M. (2024). Poverty Alleviation in Special Autonomy Systems: Dynamics and Challenges of Asymmetric Decentralization. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), 31–42. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>